



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Thamrin Nomor 93, Sail, Pekanbaru, Riau 28132,  
Laman kesbangpol.riau.go.id, Pos-el kesbangpol@riau.go.id

---

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI RIAU**

- Tugas Pokok** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah
- Fungsi** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - d. Pelaksanaan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**LAMPIRAN :**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	1. Indeks Toleransi (Indeks) 2. Indeks Kerjasama (Indeks)	<b>Formula pengukuran IHal :</b> <b><math>IHal = \sum(ki \cdot Xi)</math></b>  Pejelasan : <ul style="list-style-type: none"> <li>IHal : Nilai akhir dari Indeks Harmoni.</li> <li><math>\sum</math> : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.</li> <li>ki : Bobot yang diberikan pada setiap variabel Xi.</li> <li>Xi : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.</li> </ul>	Kemendagri RI
		Meningkatnya Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan	1. Indeks Kewarganegaraan (Indeks) 2. Indeks Pluralisme (Indeks)		
		Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Persentase)	Formulasi Perhitungan : Untuk mengukur tingkat Fasilitasi Konflik di Provinsi Riau  $\frac{\sum \text{Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun } (n)}{\sum \text{Jumlah Konflik Sosial tahun } (n)} \times 100$  Penjelasan : $\frac{\sum \text{Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun ini}}{\sum \text{Jumlah Konflik tahun ini}} \times 100$	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya Kebebasan Masyarakat Berdemokrasi	Indeks Kebebasan (Indeks)	<b>Metode/Rumus Perhitungan</b> IDI Provinsi Riau = $\sum_{i=1}^3 i P_i I (A_i)$ IDI : Indek Demokrasi Indonesia P <sub>i</sub> : Nilai Penimbang dari Aspek ke i I (A <sub>i</sub> ) : Indeks Aspek ke i I : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan  $I (A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I (V_{ij})$ I (A <sub>i</sub> ) : Indeks Aspek ke i P <sub>ij</sub> : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i I (A <sub>ij</sub> ) : Indeks Variabel ke J dari aspek ke i AHP : Analytical Hierarchy Procedur	BPS Provinsi Riau
		Efektifnya Fungsi Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		Formulasi perhitungan tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tidak menggunakan rumus matematis tunggal yang sederhana, melainkan melalui <b>evaluasi komprehensif</b> terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam <a href="#">Permen PANRB No. 88 Tahun 2021</a>

Pekanbaru, 20 Januari 2026



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU**

**BOBY RACHMAT, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19830516 200112 1 002